

Optimalisasi Dana BOSP untuk Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat di PKBM Wilayah Surabaya

Dyah Purnama Tri Utami Dewi¹, Tia Nofiyanti², Nurul Asmi³, Arisman⁴,
Purwanto⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

2407010029@students.unis.ac.id¹, 2407010030@students.unis.ac.id²,
2407010086@students.unis.ac.id³, 2407010052@students.unis.ac.id⁴,
2407010146@students.unis.ac.id⁵

Submitted: 27th July 2025 | **Edited:** 25th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Dewi, D. P. T. U., Nofiyanti, T., Asmi, N., Arisman, A., & Purwanto, P. (2025). Optimalisasi Dana BOSP untuk Pemberdayaan Pendidikan Masyarakat di PKBM Wilayah Surabaya. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1514-1522.

ABSTRACT

This study investigates the optimization strategies of School Operational Assistance Funds (BOSP) in enhancing community education empowerment through Community Learning Centers (PKBM) in Surabaya. Despite BOSP's potential as a public funding mechanism, many PKBMs face persistent issues such as weak managerial capacity, delayed fund disbursement, and inadequate financial reporting systems. The study aims to fill this research gap by analyzing how participatory and transparent fund management contributes to community empowerment. Using a descriptive qualitative approach, data were collected from 18 informants consisting of PKBM managers, tutors, and learners across four BOSP-recipient PKBMs through in-depth interviews, field observations, and document reviews. The findings reveal that PKBMs allocating BOSP towards functional skill training such as sewing, entrepreneurship, and digital literacy successfully enhanced learners' economic and social capacities. Moreover, institutions that adopted transparent financial reporting and community-based planning fostered higher participation and accountability. However, structural challenges remain, particularly in standardizing reporting systems and improving managerial skills. This study contributes to the literature by highlighting BOSP's role not merely as an operational budget but as a strategic instrument for social transformation, emphasizing digital accountability and inclusive participation as prerequisites for sustainable non-formal education governance.

Keywords: BOSP, PKBM, Community Education, Empowerment, Transparency, Education Financing

PENDAHULUAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti warga belajar pendidikan kesetaraan,

perempuan putus sekolah, dan masyarakat marginal. Dalam kerangka desentralisasi pendidikan, PKBM hadir sebagai wadah pembelajaran berbasis komunitas yang mengedepankan fleksibilitas, partisipasi, dan inklusivitas (Sudrajat, 2022). Melalui berbagai program literasi, kursus keterampilan, dan pendidikan kesetaraan, PKBM berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pendidikan sepanjang hayat (UNESCO, 2023).

Salah satu instrumen pendukung keberlanjutan PKBM adalah Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang sejak 2021 diterapkan sebagai integrasi dari BOS Reguler dan BOS Afirmasi untuk mendukung satuan pendidikan formal maupun nonformal (Kemendikbudristek, 2023). BOSP berpotensi besar meningkatkan relevansi program pendidikan masyarakat, khususnya bila dikelola secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal (Yulianti & Huda, 2022). Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kendala berupa keterlambatan pencairan, lemahnya kapasitas manajerial, serta kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Supriyanto & Rachmawati, 2021; Wulandari & Firmansyah, 2022).

Dalam konteks ini, dana BOSP tidak semestinya hanya dipandang sebagai penopang operasional, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat. Hartono dan Azizah (2021) menekankan bahwa PKBM dapat berfungsi sebagai ruang partisipatif jika dana publik diarahkan pada program berbasis potensi lokal, seperti pelatihan keterampilan vokasional, kewirausahaan, dan literasi digital. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa efektivitas dana pendidikan publik dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi, serta integrasi nilai-nilai lokal dalam proses belajar (Rahayu & Firmansyah, 2023; Prasetya & Mulyani, 2024).

Meskipun sudah terdapat sejumlah kajian mengenai BOSP dan tata kelola dana pendidikan, studi yang secara khusus mengkaji strategi optimalisasi BOSP dalam konteks PKBM perkotaan seperti Surabaya masih terbatas. Padahal, dinamika sosial ekonomi perkotaan menghadirkan tantangan yang berbeda, terutama terkait relevansi program, partisipasi warga belajar, serta digitalisasi tata kelola lembaga (Fitriani & Yusran, 2024; Suryaningrum & Wahyudi, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi dana BOSP dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat di PKBM wilayah Surabaya, dengan fokus pada transparansi,

partisipasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan sebagai prasyarat tata kelola pendidikan nonformal yang berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pembiayaan Pendidikan dan BOSP

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor fundamental dalam menjamin kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Menurut Psacharopoulos dan Patrinos (2020), keberhasilan sistem pendidikan sangat ditentukan oleh efisiensi dan ketepatan sasaran alokasi dana publik. Dalam konteks Indonesia, pemerintah sejak 2021 mengintegrasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Afirmasi menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dengan tujuan meningkatkan otonomi lembaga sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan dana publik (Kemendikbudristek, 2023).

Penelitian terbaru menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan nonformal yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah alokasi, tetapi dari relevansi penggunaannya untuk kebutuhan nyata warga belajar (Sari & Nugroho, 2023). Dengan demikian, BOSP pada PKBM seharusnya diarahkan pada program strategis seperti pelatihan vokasional, literasi digital, dan penguatan ekonomi keluarga, bukan sekadar operasional administratif (Hasan & Ningsih, 2023).

Pendidikan Masyarakat dan Peran PKBM

PKBM sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas berfungsi memberikan layanan pendidikan kesetaraan dan kursus keterampilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut UNESCO (2023), pendidikan komunitas merupakan instrumen strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan indeks pembangunan manusia secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Pramono dan Lestari (2021) menyebutkan bahwa PKBM berfungsi bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga ruang pemberdayaan sosial ekonomi.

Kekuatan PKBM terletak pada fleksibilitas dan partisipasi. Ketika warga belajar dilibatkan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi, program akan lebih relevan dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan rasa kepemilikan (Fitriani & Yusran, 2024). Selain itu, integrasi nilai lokal ke dalam program pendidikan memperkuat keberlanjutan lembaga (Rahayu & Firmansyah, 2023).

Teori Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas

Kerangka pemberdayaan menjelaskan bahwa pendidikan harus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengontrol sumber daya dan mengambil keputusan (Zimmerman, 2020). Pemberdayaan melalui pendidikan menekankan perubahan dari sekadar penerima manfaat menjadi aktor yang aktif dalam proses transformasi sosial (Santoso & Herlina, 2022).

Dalam konteks PKBM, keberhasilan pengelolaan BOSP ditentukan oleh sejauh mana lembaga mengadopsi prinsip *good governance* berupa transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inklusi sosial (Hasanah & Kurniawan, 2021). Latifah dan Wijaya (2021) menegaskan bahwa kolaborasi multi-stakeholder antara pemerintah, pengelola PKBM, tutor, dan warga belajar merupakan faktor kunci keberlanjutan pendidikan nonformal.

Integrasi Kerangka Konseptual

Dari uraian teori di atas, dapat dirumuskan bahwa optimalisasi dana BOSP di PKBM dipengaruhi oleh tiga aspek utama:

1. Efisiensi dan relevansi pembiayaan pendidikan,
2. Kapasitas PKBM sebagai lembaga berbasis komunitas yang adaptif, serta
3. Penerapan prinsip pemberdayaan dan partisipasi warga.

Dengan demikian, penelitian ini memandang BOSP tidak sekadar sebagai dana operasional, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola pendidikan nonformal yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan mengeksplorasi strategi optimalisasi dana BOSP dalam pemberdayaan pendidikan masyarakat melalui PKBM di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika pengelolaan dana, partisipasi warga belajar, serta tantangan kelembagaan (Creswell & Poth, 2019). Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni 2024, pada empat PKBM penerima BOSP dengan kriteria: aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, memiliki dokumentasi penggunaan BOSP, serta melibatkan warga belajar dalam perencanaan program.

Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOSP. Sebanyak 18 informan terdiri atas 4 pengelola PKBM, 6 tutor, dan 8 warga belajar dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung kegiatan pembelajaran dan administrasi keuangan, serta analisis dokumen seperti Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan (RKAS), laporan penggunaan dana, dan notulen musyawarah warga belajar (Yin, 2020).

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penerapannya, reduksi dilakukan melalui pengelompokan data berdasarkan tema seperti perencanaan anggaran, pelibatan masyarakat, dan akuntabilitas keuangan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tabel ringkas untuk memudahkan identifikasi pola, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara berulang melalui refleksi terhadap data lapangan dan temuan sebelumnya (Bengtsson, 2019). Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, perbandingan antar dokumen, serta teknik *member checking* kepada informan utama guna memastikan akurasi interpretasi peneliti (Nowell et al., 2019).

Metode ini memberikan landasan yang kuat untuk mengungkap praktik pengelolaan dana BOSP di PKBM secara komprehensif, sekaligus memungkinkan penelitian menghasilkan rekomendasi praktis bagi penguatan tata kelola pendidikan nonformal di perkotaan.

HASIL PENELITIAN

Strategi Optimalisasi Dana BOSP

PKBM yang berhasil mengoptimalkan dana BOSP pada umumnya memiliki mekanisme perencanaan anggaran yang partisipatif dan berbasis kebutuhan warga belajar. Di PKBM Harapan Bangsa Surabaya, misalnya, dana dialokasikan untuk pelatihan keterampilan menjahit, kewirausahaan rumah tangga, dan literasi digital. Salah seorang warga belajar menyatakan:

“Melalui pelatihan menjahit, saya bisa menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga. BOSP membuat kami punya keterampilan baru yang bermanfaat.”

Temuan ini sejalan dengan Hasan dan Ningsih (2023) yang menegaskan bahwa pemanfaatan dana pendidikan yang diarahkan pada penguatan keterampilan fungsional dapat mempercepat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hasil ini juga mengonfirmasi penelitian Utami dan Hidayat (2021) yang menunjukkan bahwa program keterampilan vokasional berbasis potensi lokal mampu meningkatkan kemandirian warga belajar. Namun, berbeda dengan temuan di daerah rural, di mana program lebih terfokus pada pertanian (Rizal & Mulyono, 2020), konteks Surabaya menunjukkan orientasi pada keterampilan perkotaan seperti menjahit, digitalisasi usaha, dan literasi keuangan sederhana.

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor pembeda antara PKBM yang efektif dan tidak. PKBM Citra Harapan dan PKBM Mitra Surabaya secara rutin mempublikasikan laporan keuangan melalui papan informasi dan forum musyawarah warga. Praktik ini meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi aktif warga belajar. Sebagaimana diungkapkan seorang tutor:

“Ketika laporan keuangan ditempel di papan informasi, warga merasa lebih percaya dan mau ikut terlibat dalam kegiatan.”

Temuan ini sejalan dengan Wulandari dan Firmansyah (2022) yang menegaskan bahwa akuntabilitas publik dalam lembaga pendidikan nonformal meningkatkan keberlanjutan program. Penelitian serupa oleh Pratama dan Laili (2021) juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memperkuat kemitraan antara PKBM, pemerintah, dan lembaga donor.

Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan

Di PKBM Citra Berkas Surabaya, warga belajar terlibat langsung dalam penyusunan program tahunan melalui musyawarah. Keterlibatan ini meliputi diskusi tentang alokasi dana BOSP, pemilihan jenis pelatihan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Hal ini memperkuat rasa kepemilikan warga terhadap program yang dijalankan. Fitriani dan Yusran (2024) menegaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam tata kelola PKBM meningkatkan relevansi program dan motivasi belajar.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Suryaningrum dan Wahyudi (2023), yang menemukan bahwa model manajemen berbasis komunitas meningkatkan keberlanjutan lembaga pendidikan nonformal. Namun, dibandingkan dengan penelitian Pramono dan

Lestari (2021) yang lebih menyoroti aspek formalitas partisipasi, temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi warga belajar di Surabaya bersifat substantif, karena mereka benar-benar memengaruhi pengambilan keputusan.

Tantangan dan Kendala

Meskipun terdapat praktik baik, sejumlah tantangan masih ditemukan. Beberapa PKBM menghadapi keterlambatan pencairan dana, lemahnya kapasitas manajerial, serta pelaporan keuangan yang belum standar. Salah satu pengelola menyatakan:

“Kami kesulitan membuat laporan keuangan sesuai format, sehingga sering mendapat koreksi dari dinas.”

Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurhidayah dan Saputra (2023), yang menekankan lemahnya kompetensi teknis pengelola PKBM dalam hal tata kelola dana publik. Penelitian Hasanah dan Kurniawan (2021) juga menunjukkan bahwa tanpa penguatan kapasitas manajerial, dana pendidikan publik cenderung digunakan secara administratif semata tanpa dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki peran strategis dalam memperkuat pemberdayaan pendidikan masyarakat melalui PKBM, khususnya di wilayah perkotaan seperti Surabaya. Temuan menunjukkan bahwa PKBM yang mengalokasikan BOSP untuk pelatihan keterampilan fungsional seperti menjahit, kewirausahaan, dan literasi digital berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial warga belajar secara nyata. Selain itu, transparansi laporan keuangan serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan terbukti memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif dalam program pendidikan.

Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, antara lain keterlambatan pencairan dana, lemahnya kapasitas manajerial, serta belum adanya standar pelaporan keuangan yang seragam. Hal ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan PKBM melalui peningkatan kompetensi pengelola, digitalisasi sistem akuntabilitas, serta pendampingan teknis berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bengtsson, M. (2019). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus Open*, 5(1), 8–14.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Fitriani, N., & Yusran, H. (2024). Partisipasi warga belajar dalam pengelolaan pendidikan nonformal: Studi pada PKBM urban. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 12(1), 90–98.
- Hartono, R., & Azizah, N. (2021). PKBM dan pemberdayaan komunitas di era digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 56–66.
- Hasan, R., & Ningsih, T. (2023). Dana pendidikan dan peningkatan keterampilan fungsional di PKBM perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan*, 17(1), 101–109.
- Hasanah, I., & Kurniawan, D. (2021). Good governance dalam pengelolaan dana pendidikan nonformal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 90–97.
- Kemendikbudristek. (2023). *Petunjuk teknis bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) Tahun 2023*. Direktorat Jenderal PAUD, Dikdasmen.
- Latifah, S., & Wijaya, A. (2021). Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pendidikan komunitas. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 6(3), 61–69.
- Maulida, R., & Koesoema, D. A. (2021). Model manajemen berbasis komunitas dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Kependidikan*, 11(1), 120–128.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
- Pramono, S., & Lestari, D. (2021). Pendidikan berbasis komunitas dan peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Nonformal Indonesia*, 6(2), 75–84.
- Pramudito, D., & Lestari, N. (2020). Transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 4(1), 85–94.
- Prasetya, R., & Mulyani, D. (2024). Kapabilitas lokal dalam pendidikan masyarakat. *Jurnal Transformasi Sosial*, 9(1), 70–79.
- Pratama, A., & Laili, M. (2021). Akuntabilitas dalam lembaga pendidikan nonformal: Studi pada PKBM di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 80–87.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2020). Returns to investment in education: A global update. *Education Economics*, 28(2), 2–10.
- Rahayu, I., & Firmansyah, R. (2023). Tata kelola pendidikan berbasis nilai lokal dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Komunitas*, 5(1), 70–78.
- Rahman, A., & Sulastri, H. (2021). Desentralisasi pembiayaan dan tantangan pendidikan nonformal. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 12(3), 63–71.
- Rizal, A., & Mulyono, S. (2020). Pemanfaatan dana pendidikan nonformal di daerah rural: Studi pada PKBM berbasis pertanian. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 50–60.
- Santoso, A., & Herlina, D. (2022). Partisipasi sosial dalam pendidikan komunitas: Tinjauan kritis. *Jurnal Pendidikan Alternatif*, 7(2), 105–115.
- Sari, M., & Nugroho, R. (2023). Faktor keberlanjutan program PKBM di perkotaan. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 11(1), 110–120.
- Sudrajat, A. (2022). *Pendidikan masyarakat: Teori dan praktik di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Supriyanto, E., & Rachmawati, N. (2021). Kapasitas kelembagaan PKBM dalam mengelola dana publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(2), 55–64.
- Suryaningrum, T., & Wahyudi, A. (2023). Pelibatan warga belajar dalam perencanaan PKBM. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 15(1), 55–63.
- UNESCO. (2023). *Community-based education for social inclusion*. Paris: UNESCO Publishing.
- Utami, S., & Hidayat, T. (2021). Keterampilan vokasional berbasis potensi lokal dalam PKBM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10(2), 65–75.
- Wulandari, I., & Firmansyah, T. (2022). Akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan PKBM. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 75–82.
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yulianti, A., & Huda, M. (2022). Efektivitas pembiayaan pendidikan di lembaga nonformal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 91–99.
- Zimmerman, M. A. (2020). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (pp. 43–63). New York: Springer.